

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab III ini, penulis memaparkan metode yang digunakan untuk melakukan penelitian. Metode penelitian ini akan menjelaskan langkah-langkah serta tahapan-tahapan yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan. Semua prosedur serta tahapan-tahapan penelitian, mulai dari persiapan hingga penelitian berakhir diuraikan secara rinci dalam bab ini. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam memberikan arahan dalam pemecahan masalah yang dikaji.

Dalam mengkaji DINAMIKA POLRI: Latar belakang dan proses pemisahan dari struktur ABRI tahun 1999, metode yang dipilih adalah metode historis dengan pendekatan interdisipliner. Metode berarti suatu cara, prosedur, atau teknik untuk mencapai atau menggarap sesuatu secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, metode merupakan salah satu ciri kerja ilmiah. Metode historis adalah suatu proses menguji, menjelaskan dan menganalisis (Gottschalk, 1985 : 32). Menurut Ismaun dalam bukunya pengantar ilmu sejarah (2005:28) menjelaskan :

“Metode sejarah adalah seperangkat sarana/sistem yang berisi asas-asas atau norma-norma, aturan-aturan, prosedur, metode dan teknik yang harus diikuti untuk mengumpulkan segala kemungkinan saksi mata (*witness*) tentang suatu masa atau peristiwa, untuk mengevaluasi kesaksian

(*testimony*) tentang saksi-saksi tersebut, untuk menyusun fakta-fakta yang telah diuji dalam hubungan-hubungan kausalnya dan akhirnya menyajikan pengetahuan yang tersusun mengenai peristiwa-peristiwa tersebut”.

Selain metode, dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sebuah pendekatan untuk membantu menggambarkan peristiwa yang menjadi topik kajian dari penulis. Seperti yang diungkapkan oleh Sartono Kartodirdjo (1993:4) bahwa dalam menggambarkan suatu peristiwa sangat tergantung pada pendekatan yang digunakan yaitu dari perspektif mana kita memandangnya, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur mana yang diungkapkan dan lain sebagainya.

Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan interdisipliner. Pendekatan interdisipliner yang dimaksud adalah dengan menggunakan ilmu bantu sejarah seperti ilmu sosiologi dan politik yang masih serumpun ke dalam ilmu sosial. Penelitian ini menekankan pada aspek sosial politik. Pendekatan sosial dan politik digunakan untuk memahami latar belakang terjadinya dan proses pemisahan POLRI dari struktur ABRI tahun 1999.

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan tahapan penelitian yang dikembangkan oleh Sjamsudin (1996: 25), yaitu:

1. Memilih satu topik yang sesuai.
2. Mengusut semua evidensi yang relevan dengan topik.

3. Membuat catatan tentang evidensi atau bukti yang dianggap penting dan relevan dengan topik yang ditemukan ketika penelitian sedang dilakukan.
4. Mengevaluasi secara kritis semua evidensi yang sudah dikumpulkan (kritik sumber), baik secara ekstern maupun intern.
5. Menyusun semua hasil penelitian dalam suatu pola yang benar dan berarti.
6. Menyajikan dalam suatu cara yang dapat menarik perhatian dan mengkomunikasikannya kepada pembaca sehingga dapat dimengerti (historiografi).

Dari tahapan di atas dapat diklasifikasikan menjadi 3 tahap, yaitu tahap persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian dan penulisan laporan penelitian.

3.1 Tahap Persiapan Penelitian

3.1.1 Penentuan Topik Penelitian

Langkah pertama yang dilaksanakan oleh penulis untuk memulai penelitian ini adalah dengan menentukan topik yang sesuai keinginan dan kemampuan penulis yaitu DINAMIKA POLRI: Latar belakang dan proses pemisahan dari struktur ABRI tahun 1999. Penulis memilih topik tersebut, pada awalnya terinspirasi ketika membaca buku tentang militer yang berjudul TNI - POLRI di masa perubahan politik yang ditulis oleh Ikrar Nusa Bhakti dkk. Pada saat itu penulis menemukan permasalahan yang menurut penulis itu menarik untuk dijadikan bahan penelitian skripsi yaitu mengenai pemisahan polisi dari

ABRI, peristiwa ini terjadi bersamaan dengan adanya reformasi dan jatuhnya kekuasaan Soeharto kepada Presiden B.J. Habibie.

Berdasarkan keingintahuan dari penulis untuk mengkajinya lebih dalam, apakah ada hubungannya dengan jatuhnya pemerintahan Soeharto yang mengakibatkan birokrasi kepolisian juga ikut terseret untuk mengadakan perubahan struktur, kemudian pada awalnya penulis mengajukan topik tentang SEJARAH PERKEMBANGAN POLRI: Disintegrasi POLRI dari struktur TNI tahun 2000, kepada Tim Pertimbangan Penulisan Skripsi (TPPS) Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI. Setelah topik tersebut disetujui oleh TIM Pertimbangan Penulisan Skripsi (TPPS) Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI pada bulan September 2011. Topik tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan proposal penelitian yang memuat di antaranya:

- Latar belakang masalah
- Rumusan dan Batasan masalah
- Tujuan penelitian
- Manfaat penelitian
- Metode dan Teknik penelitian
- Tinjauan pustaka
- Sistematika penulisan
- Daftar pustaka

3.1.2 Penyusunan Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian atau yang lebih dikenal dengan proposal penelitian merupakan salah satu bagian yang harus dilewati sebelum melakukan penelitian. Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Abdurahman, 2007:48) yang mengatakan bahwa perencanaan penelitian pada pokoknya merupakan suatu rentetan petunjuk yang disusun secara logis dan sistematis.

Rancangan penelitian merupakan kerangka dasar yang dijadikan acuan dalam penyusunan laporan penelitian. Sehingga dalam penyusunan rancangan penelitian, sekurang-kurangnya berisi judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metode dan teknik penelitian, dan sistematika penulisan.

Setelah dipresentasikan dalam seminar proposal yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2011, tema yang diajukan tidak mengalami perubahan secara menyeluruh, kecuali perubahan terhadap judul dan rumusan masalah yang diajukan penulis dalam proposal penelitian. Dalam proposal penulisan mengajukan judul "*SEJARAH PERKEMBANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA: Disintegrasi Kepolisian dari struktur TNI pada tahun 2000*". Setelah mendapat masukan dari calon pembimbing skripsi yaitu Bapak Dr. Agus Mulyana, M.Hum dan Bapak Moch. Eryk Kamsory, S.Pd maka judul

dirubah menjadi DINAMIKA POLRI: Latar Belakang dan Proses Pemisahan dari Struktur ABRI Tahun 1999.

3.1.3 Mengurus Perizinan

Sebagai penunjang penelitian ini, penulis meminta surat keterangan penelitian dari Universitas. Sesuai prosedur yang berlaku di UPI, bulan November 2011 penulis mengurus perizinan ke pihak Jurusan Pendidikan Sejarah terlebih dahulu, setelah mendapat rekomendasi atau pengantar dari pihak Jurusan, maka langkah kedua penulis melangsungkannya ke bagian akademik Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Surat keterangan penelitian tersebut nantinya akan digunakan oleh penulis ketika akan mencari data baik itu keperorangan maupun lembaga atau institusi sehingga dapat mempermudah dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian. Surat itu ditujukan kepada :

- a. Kepala Kantor POLDA Jawa Barat
- b. Kepala Kantor Mabes POLRI
- c. Kepala Kantor Pusjarah TNI AD Jawa Barat

3.1.4 Proses Bimbingan

Bimbingan merupakan suatu kegiatan konsultasi yang dilakukan oleh penulis dengan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II dalam

menyelesaikan permasalahan dalam penelitian. Proses bimbingan dilakukan setelah penulis memperoleh SK penunjukan pembimbing pada bulan November 2011 dengan nomor SK 046/TPPS/JPS/2011. Berdasarkan SK tersebut, dosen pembimbing terdiri dari dua orang pembimbing yaitu Bapak Dr. Agus Mulyana, M.Hum., sebagai pembimbing I dan Bapak Moch. Eryk Kamsori, S.Pd., sebagai pembimbing II.

Pada proses bimbingan, penulis mulai melaksanakan kegiatan bimbingan baik itu dengan pembimbing I maupun pembimbing II. Kegiatan bimbingan dilakukan atas kesepakatan diantara kedua belah pihak. Penulis melakukan hal ini agar terjalin komunikasi yang baik antar peneliti dan pihak pembimbing berkenaan dengan permasalahan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis beranggapan bahwa kegiatan bimbingan ini sangat diperlukan untuk dapat menemukan langkah yang paling tepat dalam proses penyusunan skripsi, dengan jalan berdiskusi dan bertanya mengenai permasalahan yang sedang dikaji serta untuk mendapatkan petunjuk atau arahan mengenai penulisan skripsi maupun dalam melaksanakan proses penelitian. Setiap hasil penelitian dan penulisan diajukan pada pertemuan dengan masing-masing pembimbing dan tercatat dalam lembar frekuensi bimbingan.

3.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian

3.2.1 Heuristik

Dalam proses Heuristik, penulis berpedoman pada pendapat Helius Sjamsudin dalam bukunya metodologi Sejarah (2007:86) mengemukakan bahwa sumber sejarah itu meliputi segala sesuatu yang langsung maupun tidak langsung menceritakan tentang suatu kenyataan atau kegiatan manusia pada masa lampau.

Dalam pencarian sumber tertulis, penulis mengunjungi institusi-institusi serta toko-toko buku yang dapat memberikan sumber tertulis yang berkaitan dengan Kepolisian dan Militer.

- a. Perpustakaan UPI Bandung, diperpustakaan ini penulis mendapatkan sumber-sumber buku yang berkaitan langsung dengan bahan penelitian penulis mengenai kepolisian pasca Reformasi dan pedoman hidup serta pedoman kerja POLRI yang dikenal dengan Tri Brata Catur Prasetya (Doktrin POLRI).
- b. Perpustakaan Mabes Polri, diperpustakaan ini penulis mendapatkan sumber-sumber buku yang berkaitan langsung dengan bahan penelitian skripsi ini mengenai susunan kepangkatan polri dari masa ke masa dan peraturan-peraturan dari pemerintah mengenai polri, seperti Penetapan Pemerintah, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden.
- c. Perpustakaan Bhayangkara, POLDA Jabar. Di perpustakaan ini penulis banyak mendapatkan sumber-sumber buku yang berkaitan langsung dengan pembahasan skripsi ini seperti mengenai tugas dan fungsi

POLRI, dinamika POLRI dalam ketatanegaraan RI, sejarah kepolisian di Indonesia.

d. Perpustakaan Dinas Sejarah TNI AD Jabar, perpustakaan ini penulis mendapatkan sumber buku mengenai sejarah perkembangan kepolisian dari zaman klasik-modern serta kedudukan dan organisasi POLRI ketika masih dalam naungan ABRI.

e. Toko-toko buku, selain ke beberapa perpustakaan peneliti juga mencari sumber-sumber buku yang akan dipakai sebagai bahan penelitian skripsi ini seperti ke toko buku Palasari dan Dewi Sartika. Di Palasari penulis mendapatkan buku mengenai Reformasi POLRI dan TNI di dalam perubahan politik Indonesia, sedangkan di Dewi Sartika penulis mendapatkan sumber buku mengenai polisi dan politik serta POLRI dalam transisi demokrasi.

Sumber tertulis yang telah didapat kemudian dibaca, dipahami dan dikaji untuk melihat kesesuaiannya dengan permasalahan penelitian. Penulis mencatat hal-hal penting yang didapat dari tiap sumber, seperti daftar pustaka dan kutipan-kutipan yang diperlukan.

3.2.2 Kritik Sumber

Setelah melakukan proses pencarian sumber (*heuristik*), maka langkah selanjutnya adalah melakukan kritik. Kritik menurut Sjamsudin (2007:130)

adalah “kegiatan-kegiatan” analisis yang harus ditampilkan oleh para Sejarawan terhadap dokumen-dokumen setelah terkumpul yang berupa arsip. Penulis menggunakan kritik sumber terhadap sumber-sumber sekunder yang berupa buku-buku yang telah diperoleh dalam tahap mencari dan mengumpulkan sumber (*heuristik*), kritik sumber dilakukan terhadap sumber utama dan buku penunjang lainnya. Helius Sjamsudin (2007:131) menjelaskan bahwa fungsi kritik sumber bagi Sejarawan yang erat kaitannya dalam usaha mencari kebenaran, dimana Sejarawan seringkali dihadapkan dengan kebutuhan untuk membedakan apa yang benar dan apa yang tidak benar. Kritik tersebut secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni kritik eksternal dan kritik internal.

3.2.2.1 Kritik Eksternal

Tahap pertama dalam melakukan kritik sumber yaitu kritik eksternal, kritik eksternal merupakan cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar sumber sejarah misalkan melakukan penelitian atas asli atau tidaknya sumber, berarti ini menyeleksi segi fisik dari sumber yang ditemukan. Semua autensitas ini minimal dapat diuji berdasarkan lima pertanyaan pokok seperti kapan sumber itu dibuat, dimana sumber itu dibuat, siapa yang membuatnya, dari bahan apa sumber itu dibuat dan apakah sumber itu dalam bentuk asli atau tidak.

Contoh kritik eksternal yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah difokuskan untuk mengkritisi terhadap buku yang berjudul *Merenungi Kritik Terhadap POLRI*, buku ini terdiri dari beberapa tulisan yang ditulis dari berbagai kalangan, mulai dari praktisi, akademisi, politikus maupun dari aparat TNI-POLRI mengenai kepolisian termasuk tulisan-tulisan tentang pro kontra Reformasi POLRI. Buku ini disunting oleh Jend. Pol. (Purn) Drs. Kunarto. Beliau merupakan mantan KAPOLRI yang ke XI, dalam buku ini beliau berusaha untuk memberikan penjelasan secara objektif mengenai kepolisian Republik Indonesia khususnya tentang reformasi POLRI, kendatipun beliau merupakan aparat sekaligus mantan perwira POLRI yang biasanya lebih bersifat subjektifitas ketika melihat fenomena ini. Selain itu, buku ini ditulis pada tahun 1995, tepatnya 3 tahun sebelum terjadinya peristiwa reformasi yang terjadi di Indonesia. Pada dasarnya, memang ketika buku ini diterbitkan kedudukan POLRI masih berada dibawah ABRI. Namun hal ini tidak menjadikan suatu persoalan untuk dikritisi secara eksternal walaupun reformasi POLRI berlangsung pada tahun 1998 karena isu pemisahan POLRI sebelumnya sudah sering dibicarakan salah satunya lewat seminar-seminar.

Dalam buku ini, peneliti mengkritisi beberapa tulisan diantaranya: Pertama, karya Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, beliau merupakan guru besar di Peruguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Kedua, karya Prof. Dr. Sahaetapy, beliau merupakan tokoh yang bergelut di bidang hukum Pidana. Selain itu,

beliau merupakan guru besar di Universitas Airlangga, Surabaya. Ketiga, karya Prof. Dr. Duddy Singadilaga, SH. MPA, beliau merupakan orang yang berprofesi di bidang hukum tata negara dan terakhir, tulisan karya dari Jenderal TNI (Purn). Soeharto (Presiden RI pada waktu itu). Beliau merupakan orang yang berasal dari kalangan perwira TNI AD.

Setelah membaca biografi singkat dari para penulis tersebut, peneliti beranggapan bahwa tulisan Jenderal TNI (Purn). Soeharto cenderung subjektif karena latar belakang beliau berasal dari kalangan perwira TNI AD. Sama dengan tulisan karya Jend. TNI (Purn) Soeharto, tulisan karya Prof. Dr. Duddy Singadilaga lebih bersifat subjektif dan cenderung pro terhadap TNI. Beliau berasumsi bahwasannya POLRI tidak perlu keluar dari ABRI namun cukup dengan menaikkan anggaran POLRI, karena beliau memandang kedudukan dan fungsi POLRI yang berlandaskan kepada UU No 20/1982 yang diubah menjadi UURI No 1/1988 tentang penggabungan POLRI dengan ABRI yang didalamnya dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan keamanan NKRI.

3.2.2.2 Kritik Internal

Tahap kedua adalah kritik internal, kritik dalam bentuk menilai kredibilitas sumber dengan mempersoalkan isinya, kemampuan pembuatannya, tanggung jawab dan moralnya. Menilai isi informasi yang didapatkan adalah dengan membandingkan antara sumber yang satu dengan sumber lainnya yang

sejenis. Kritik intern sumber tertulis, dilakukan peneliti dengan melihat apakah isi dari buku tersebut memberikan informasi-informasi yang dapat dipertanggung jawabkan dan dibuat berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan yang berlaku. Peneliti juga membandingkan dengan sumber satu dengan sumber yang lainnya, apakah terdapat kesamaan pendapat atau perbedaan. Setelah didapatkan persamaan dan perbedaan tersebut peneliti menilai hal-hal yang dapat dipercaya dan tidak.

Contoh kritik internal yang dilakukan oleh peneliti adalah terhadap tulisan-tulisan dari para tokoh yang terdapat dalam buku yang berjudul *Merenungi Kritik Terhadap POLRI*. Dalam buku ini terdapat tulisan dari Prof. Dr. Sarlito yang berjudul *POLRI idealnya dibawah Dephankam*. Menurutnya, POLRI berada dibawah Dephankam bukan dibawah MABES ABRI, mengingat fungsi dan tugas POLRI yang khas dan berbeda dengan fungsi militer yang diemban oleh TNI. Maka dari itu, fungsi kepolisian dikembalikan sebagai fungsi polisi, dimana dalam tugasnya kepolisian harus lebih bisa mengayomi masyarakat (tertib sipil) dan bukan sebagai fungsi militer yang harus pintar berperang dan dapat menaklukan musuh. Secara kestrukturannya polisi bertanggung jawab langsung kepada Menkumham sebagai alat penegak hukum sedangkan militer dalam hal ini, TNI AD, TNI AL dan TNI AU harus bertanggung jawab langsung kepada Panglima TNI. Posisi POLRI dibawah

naungan ABRI telah mencerminkan ketidak jelasan kepolisian sebagai polisi sipil yang lebih dipandang sebagai polisi militer.

Kedua, tulisan dari Prof. Dr. Sahaetapy yang berjudul *Pisahkan polisi dari ABRI*. Dalam buku ini dijelaskan, dalam tertib sipil polisi seharusnya berada diluar ABRI sehingga akan menjadikan kepolisian lebih dewasa. Sejalan dengan hal itu, secara teoritis misi dan visi kedua institusi tersebut sangatlah berbeda sehingga tujuan kedua lembaga tersebut kalau tetap disatukan akan menjadi tidak jelas.

Ketiga, tulisan dari Prof. Dr. Duddy Singadilaga. Berbeda dengan Sarlito dan Sahaetapy, Menurut Duddy POLRI harus tetap berada dalam naungan ABRI. Ia menegaskan dalam menjalankan fungsinya, POLRI tidak semata-mata bertugas untuk ketertiban dan penegakan hukum saja. Begitu pula militer (TNI) yang berada di jajaran Dephankam, berfungsi dalam keamanan dan pertahanan negara terhadap kemungkinan bahaya dari luar maupun dari dalam. Kenyataan juga menunjukkan bahaya terhadap negara dan masyarakat seperti ketika terjadinya pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok NII dan PKI. Hal ini, menunjukkan penggabungan POLRI-TNI bukan suatu masalah yang mendasar untuk diperdebatkan dan penggabungan POLRI-TNI merupakan hasil proses pemikiran yang masih relevan untuk dipertahankan sampai sekarang. Landasan formilnya sebagaimana yang dicantumkan dalam UU No. 20/1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok keamanan NKRI yang

diubah dengan UU No. 1/1988, POLRI tergabung dalam ABRI (Kunarto, 1995: 302).

Keempat tulisan dari Jend. TNI (Purn). Soeharto yang berjudul *POLRI dan ABRI tidak terpisahkan*. Menurutnya, karena latar belakang sejarah, POLRI lahir ditengah suasana revolusi dan perang kemerdekaan bersama TNI Sehingga sebagai alat negara yang berjuang melawan penjajah, POLRI dan ABRI tidak bisa dipisahkan karena tugas antara kedua institusi tersebut saling erat kaitannya, apalagi untuk menghadapi tantangan dunia di zaman modern POLRI dan TNI harus siap membendung ancaman-ancaman terhadap masyarakat, peradaban, dan kemanusiaan serta lajunya pembangunan. Ukuran keberhasilan POLRI apabila masyarakat sudah menikmati rasa aman dan nyaman dalam mempertahankan kehidupannya.

Hasil dari kritik eksternal dan internal menurut penulis merupakan data yang valid. Kemudian data-data inilah yang akan penulis jadikan sebagai bahan bagi penulisan skripsi.

3.2.3 Interpretasi

Interpretasi adalah menafsirkan keterangan dari sumber-sumber sejarah berupa fakta yang terkumpul dengan cara dirangkai dan dihubungkan sehingga tercipta penafsiran sumber sejarah yang relevan dengan permasalahan. Tahap interpretasi juga dapat diartikan sebagai pemberian makna terhadap data atau

fakta yang sebelumnya sudah dikumpulkan. Sjamsuddin (2007: 158) menjelaskan bahwa disadari atau tidak, para Sejarawan berpegang pada satu atau kombinasi beberapa filsafat sejarah yang menjadi dasar penafsirannya. Filsafat sejarah yang mendasari hal tersebut dibagi menjadi dua yaitu determinisme dan kemauan bebas (*free will*).

Penafsiran terhadap fakta-fakta sejarah yang terdapat dalam skripsi ini, peneliti menggunakan pemikiran deterministik. Filsafat sejarah deterministik ini menolak semua penyebab yang berdasarkan kebebasan manusia dalam menentukan dan mengambil keputusan sendiri dan menjadikan manusia sebagai robot yang tindakannya dipengaruhi oleh faktor-faktor luar. Tenaga-tenaga yang diluar diri manusia berasal dari dunia fisik seperti geografi, etnologi, sistem ekonomi dan sosial. (Romein dan Lucey dalam Sjamsuddin, 2007: 163). Alasan peneliti menggunakan filsafat deterministik ini karena semua peristiwa yang dibahas dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh faktor dari luar individu manusia yaitu kondisi sosial, dan politik yang menyebabkan manusia mengambil kebijakan dan keputusan sejarah.

Diantara berbagai bentuk filsafat deterministik, penulis memilih menggunakan penafsiran sintetis (Sjamsuddin, 2007: 170) menjelaskan bahwa penafsiran sintetis mencoba menggabungkan semua faktor dan tenaga yang menjadi penggerak sejarah. Dalam penafsiran ini, peneliti memandang bahwa tidak ada faktor tunggal yang cukup untuk menjelaskan semua peristiwa

sejarah. Semua faktor akan saling berkaitan dan manusia tetap menjadi pemeran utama dalam sejarah tersebut.

Dalam skripsi ini faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah faktor politik yaitu dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 13 tahun 1961, yang berisi tentang kedudukan kepolisian yang menjadikan kedudukan kepolisian dibawah ABRI. Kondisi ini mengakibatkan kinerja kepolisian dalam menjalankan tugasnya tidak profesional, karena persoalan-persoalan yang seharusnya dikerjakan oleh kepolisian pada akhirnya dikerjakan oleh TNI sebagai institusi induknya. Dengan demikian, kedudukan POLRI dalam struktur ABRI memiliki sejarah politik yang panjang dan bersifat kompleks. Selain itu juga hal ini dipengaruhi oleh sistem kekuasaan yang diterapkan oleh pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Pada masa pemerintahan orde baru di bawah Soeharto Politik dwi fungsi ABRI menjadikan kedudukan TNI di pemerintahan semakin kuat, dengan demikian kepolisian yang berada dalam satu institusi dengan TNI tidak dapat berbuat banyak apalagi mencapai kemajuan.

3.2.4 Historiografi

Fase terakhir dalam metode sejarah adalah Historiografi. Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan (Abdurahman, 2007: 76). Dengan kata lain, historiografi

adalah penulisan hasil penelitian sebagai proses yang dilakukan setelah sumber-sumber sejarah yang ditemukan selesai dianalisis dan ditafsirkan. Penulis menceritakan apa yang telah didapat dengan disertai penafsiran-penafsiran sehingga terciptalah sebuah rangkaian sejarah peristiwa yang utuh.

Ketika Sejarawan memasuki tahap menulis maka bukan hanya keterampilan dalam hal teknis yang diperlukan tetapi hal yang utama adalah menggunakan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya karena pada akhirnya harus menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitian dalam sebuah penulisan yang utuh (Sjamsuddin, 2007 : 156).

Sebuah karya tulis bisa dikatakan ilmiah apabila memenuhi syarat-syarat keilmuan. Namun selain itu, penyajian suatu karya ilmiah juga harus memperhatikan tata dan susunan bahasa agar manfaat yang didapat dalam penyusunan karya ilmiah menjadi optimal, maka penyajian penelitian harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan tata bahasa yang baku dan disepakati secara umum. Penyajian harus diuraikan secara sistematis dan kronologis, sesuai dengan aturan dalam pedoman penulisan karya ilmiah.

3.3 Laporan Penelitian

Historiografi merupakan tahapan akhir yang dilakukan dalam prosedur penelitian ini. Tahapan ini merupakan langkah penyusunan hal-hal yang telah penulis dapatkan dalam bentuk penulisan skripsi. Historiografi berarti pelukisan

sejarah, gambaran sejarah tentang peristiwa yang terjadi pada waktu yang telah lalu yang disebut sejarah (Ismaun, 2005: 28). Pada penulisan ini peneliti merekonstruksi berbagai fakta yang telah ditemukan dan yang telah dipahami serta dimengerti secara mendalam sehingga penulis dapat menjawab segala permasalahan yang ada dalam penelitian yang telah dilakukan.

Berbagai penafsiran yang telah didapatkan dikaitkan menjadi beberapa fakta, disusun ke dalam sebuah skripsi. Di dalam skripsi ini tertuang berbagai hal yang telah dilakukan dan dihadapi oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Selain itu, dituangkan pula berbagai informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Fakta yang didapat oleh penulis tidak hanya ketika melakukan penelitian saja, namun peneliti juga mendapatkannya ketika penulisan laporan ini sedang disusun. Fakta baru ini memberikan informasi dan kontribusi yang penting sehingga penulisan laporan ini menjadi lebih baik lagi. Fakta baru juga dicari oleh penulis ketika merasa ada yang kurang dalam penelitian ini.

Skripsi ini ditulis dengan menggunakan sistematika yang berlaku dalam jurusan Pendidikan Sejarah dengan menggunakan ejaan yang telah disempurnakan. Penulisan skripsi ini mengacu pada buku pedoman karya ilmiah yang dikeluarkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Penulisan ini ditujukan sebagai salah satu tugas akhir akademis yang harus ditempuh oleh

mahasiswa dalam jurusan Pendidikan Sejarah untuk menyelesaikan pendidikan tingkat sarjana.

Hasil penelitian akan disusun ke dalam lima bab, yang terdiri dari Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, Pembahasan, dan Kesimpulan. Pembagian penyusunan kedalam lima bab ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap karya tulis ini.

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan kerangka pemikiran mengenai pentingnya penelitian terhadap DINAMIKA POLRI: Latar belakang dan proses pemisahan dari struktur ABRI tahun 1999. Untuk memfokuskan penelitian maka bab ini dilengkapi pula dengan rumusan masalah dan pembatasan masalah. Bab ini juga memuat mengenai tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan serta dilengkapi dengan uraian sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini dipaparkan mengenai sumber-sumber buku dan sumber lain yang digunakan oleh penulis sebagai sumber rujukan yang dianggap relevan dalam proses penelitian terhadap DINAMIKA POLRI: Latar belakang dan proses pemisahan dari struktur ABRI tahun 1999. Dijelaskan pula tentang beberapa kajian dan materi yang berkaitan dengan konsep Struktural dan fungsi yang digunakan sebagai landasan teori.

Bab III Metodologi Penelitian. Bab ini akan menjelaskan mengenai serangkaian kegiatan serta cara-cara yang ditempuh dalam melakukan

penelitian untuk mendapatkan sumber yang relevan dengan masalah yang sedang dikaji oleh penulis. Diantaranya heuristik, yaitu proses pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Kritik yaitu melakukan penilaian secara intern dan ekstern terhadap data yang telah diperoleh dalam langkah sebelumnya, untuk mendapatkan berbagai informasi yang akurat berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, interpretasi yaitu penafsiran terhadap fakta yang telah ditemukan karena pemahaman dan pemikiran yang dilakukan terhadap permasalahan yang diteliti, serta historiografi yaitu tahapan terakhir dalam sebuah penelitian sejarah yang merupakan suatu kegiatan penulisan dan proses penyusunan hasil penelitian.

Bab IV Perkembangan POLRI dan perubahannya pada masa Reformasi. Bab ini merupakan pembahasan atas jawaban pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dan proses pemisahan POLRI dari ABRI. Pada bab ini juga dijelaskan tentang kedudukan dan peran POLRI sebelum reformasi tahun 1961 - 1998. Selain itu akan dijelaskan pula tentang kedudukan dan peran POLRI sesudah terjadinya reformasi serta dampak bagi kedudukan, fungsi dan peran POLRI sendiri setelah terjadinya reformasi pada tahun 1999.

Bab V Kesimpulan. Didalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan serta sebagai inti dari

pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan menguraikan hasil temuan penulis tentang permasalahan yang dikaji pada penulisan skripsi ini.

